

RESMI! MK LARANG JABATAN SIPIL UNTUK POLISI

Daftar Nama Beberapa

Perwira Polisi di Jabatan Sipil

- Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono, di Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah
- Inspektur Jenderal Yudhiawan, di Kementerian Kesehatan
- Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, di Dewan Perwakilan Daerah RI
- Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto, di Kementerian Lingkungan Hidup
- Inspektur Jenderal Pudji Prasetyanto Hadi, di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara
- Brigadir Jenderal Ruslan Aspa, di Badan Pengusahaan Batam
- Brigadir Jenderal Edi Mardianto, di Kementerian Dalam Negeri
- Brigadir Jenderal Rahmadi, di Kementerian Lingkungan Hidup
- Komisaris Besar Yulmar Try Himawan, di Bank Tanah
- Brigadir Jenderal Raden Slamet Santoso, di Kementerian Olahraga
- Komisaris Besar Jamaludin, di Badan Penyelenggara Haji
- Brigadir Jenderal Moh. Irhamni, di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Brigadir Jenderal Sony Sonjaya, di Badan Gizi Nasional

- Brigadir Jenderal Dover Christian, di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Brigadir Jenderal Yuldi Yusman, di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Komisaris Jenderal Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Komisaris Jenderal I Ketut Suardana sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- Inspektur Jenderal Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasarakatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Inspektur Jenderal Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Inspektur Jenderal Alexander Sabar sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital
- Brigadir Jenderal Achmadi di Kementerian Ekonomi Kreatif

- Inspektur Jenderal Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasarakatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Inspektur Jenderal Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Inspektur Jenderal Alexander Sabar sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital
- Inspektur Jenderal Ahmad Nurwakhid sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Inspektur Jenderal Ahmad Nurwakhid sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Brigadir Jenderal Raja Sinambela sebagai Direktur Siber Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kementerian P2MI/BP2MI
- Brigadir Jenderal Frans Tjahyono sebagai Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup
- Brigadir Jenderal Arif Fajarudin sebagai Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) menggema lantang di ruang sidang, menandai babak baru dalam relasi kekuasaan sipil dan aparat berseragam. MK resmi menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi merangkap jabatan di luar institusinya. Ditegaskan, setiap anggota Polri yang ingin duduk di kursi jabatan sipil, harus lebih dulu menanggalkan seragam dan status dinas. Putusan bernomor 114/PUU-XXIII/2025 itu menghapus frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam UU Polri yang dinilai membuka celah rangkap jabatan. MK menilai, celah itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menegaskan akan segera menindaklanjuti. Hal ini juga menjadi masukan bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang saat ini tengah bekerja. Sementara, Mabes Polri mengaku masih menunggu salinan resmi dari MK dan akan mempelajari hasil putusan tersebut. Diketahui, berdasarkan data Ahli pemohon uji materi ada sedikitnya 4.351 polisi rangkap jabatan.

Putusan Lengkap MK Larangan Polisi di Jabatan Sipil

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KENAIKAN UMP 2026 TAK KUNJUNG DIUMUMKAN, MENAKER: TUNGGU SAJA

Ketentuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tak kunjung diumumkan. Hingga kini, formula penghitungan upah juga belum juga dirilis. Meski demikian penolakan buruh sudah mencuat. Mereka menolak keras jika nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 ditetapkan menggunakan indeks 0,2 hingga 0,7. Skema tersebut disebut akan merugikan jutaan buruh di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pembahasan ketentuan UMP 2026 masih dibahas di Dewan Pengupahan Nasional maupun Dewan Pengupahan Provinsi. "Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari serikat pekerja, buruh dan pengusaha, tunggu saja," ungkap Yassierli dikutip Kamus (13/11/2025).

Dalam konferensi pers di atas kaYassierli enggan menjawab saat ditanyakan terkait kapan penetapan upah minimum ini diumumkan. Namun dalam kesempatan sebelumnya, Menaker sempat menyebut pihaknya akan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang kenaikan UMP 2026 sebelum tanggal 21 November.

"UMP progresnya kita sedang menyiapkan regulasinya. Bisa jadi berubah (formulasinya), kita buka peluang," ungkapnya di Kantor Kemaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan penolakannya terhadap usulan kenaikan upah minimum tahun 2026 yang diajukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan kalangan pengusaha. Ia



menegaskan, serikat buruh tetap berpegang pada tuntutan kenaikan upah UMP 2026 antara 8,5 persen hingga 10,5 persen.

"Angka 8,5 hingga 10,5 persen itulah yang menjadi acuan bagi serikat buruh di seluruh daerah, baik di Dewan Pengupahan provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, kami juga memperjuangkan adanya upah minimum sektoral yang nilainya harus lebih besar daripada UMK," tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.

Said Iqbal juga menolak rencana pemerintah yang, melalui Menaker dan Wakil Menaker, berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

"PP ini belum dibahas dengan serikat pekerja. Dan baru akan diterbitkan menjelang penetapan

upah minimum. Jadi kalau tiba-tiba PP itu diterbitkan, itu ngawur dan ngaco," ujar Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, mengingatkan agar kebijakan kenaikan upah tidak dilakukan secara terburu-buru.

Ia menyoroti pengalaman tahun sebelumnya, ketika kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen di sejumlah daerah justru tidak mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Menurut Anne, sektor padat karya seperti tekstil dan garmen justru makin tertekan akibat kenaikan upah tersebut.

"Tahun lalu, waktu upah minimum dipaksakan naik 6,5 persen dan beberapa daerah juga menerapkan

upah minimum sektoral, nyatanya bukannya menambah lapangan kerja, tapi semua sudah tahu datanya. Jadi, tolong kali ini simpan egonya kita, bagi semua pihak yang menentukan upah minimum," kata Anne.

Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan dua skema kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang tenggat pengumuman pada 21 November 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa indeks tertentu yang digunakan dalam formula besaran UMP tahun depan setidaknya harus sama dengan tahun ini, yakni 0,9. Indeks tertentu merupakan alat ukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dipertimbangkan dengan angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dalam perhitungan upah minimum.

"Pertama, tidak boleh kurang dari kenaikan upah minimum tahun lalu sebesar 6,5%, karena Presiden sudah menentukan indeks tertentu sekitar 0,9," kata Said melalui pesan suara kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Skema kedua adalah dengan menggunakan indeks tertentu usulan KSPI yakni sebesar 0,9–1,0 atau 1,0–1,4, tergantung pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi.

Dia lantas menjelaskan bahwa kurun waktu yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Dengan demikian, didapatkan angka 5,12% (pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025) dan 2,65% (inflasi September 2025, YoY).

"Maka perhitungan kenaikan upah minimumnya adalah 2,65% inflasi ditambah 1,0 [indeks tertentu], lalu dikali 5,12% pertumbuhan ekonomi. Didapat angka 7,77% [kenaikan UMP]," terang Said. (tin,ist/dya)

Usai Indofarma PHK 413 Karyawan

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria menjelaskan kondisi terkini PT Indofarma Tbk (INAF) setelah pemutusan hubungan kerja terhadap 413 karyawan. Menurut Dony, pengurangan karyawan itu bukan pemecatan, melainkan bagian dari restrukturisasi bisnis.

"Sebenarnya kan bukan PHK ya, tetapi kita menawarkan offering untuk penyehatan itu, tapi sebagian kita rekrut kembali," ujarnya saat ditemui di Garuda Sentra Operasi,

Tangerang, Banten, Kamis (13/10/2025).

Sebanyak 413 karyawan Indofarma terkena PHK pada 15 September 2025, menyisakan hanya tiga orang. Namun pada akhir bulan yang sama, perusahaan kembali merekrut 18 karyawan baru.

Dony menjelaskan, Danantara tengah mengubah struktur bisnis Indofarma. Salah satunya melalui konsolidasi dengan PT Kimia Farma Tbk (KAEP). Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat industri kesehatan nasional. "Intinya,

pemerintah di Danantara tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak proper. Makanya mereka happy semua. Ini bagian dari proses turn around," kata Dony.

Ia menegaskan, Danantara tidak akan terus menyuntik dana ke BUMN bermasalah. Dukungan modal hanya diberikan untuk perusahaan dengan prospek bisnis jelas. Baca berita tanpa iklan.

Menurut dia, Indofarma masih punya peluang tumbuh seiring transformasi yang sedang berjalan.

"Kalau perusahaannya tidak masuk dalam profile sehat, kan

percuma dikasih uang itu dari bisnis yang enggak ada. Jadi kita mesti logis. Kan uang rakyat, nanti kita ingin bagi-bagi, kalau enggak ketemu, ya bahaya, kan. Nah, ini kita hitung di Indofarma juga begitu. Nanti Indofarma-nya akan bergabung dengan Kimia Farma," ujar Dony.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Indofarma menyebut PHK terhadap 413 karyawan dilakukan untuk efisiensi biaya operasi. Langkah tersebut diambil untuk memenuhi kewajiban sesuai Putusan Homologasi Nomor 1267 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 jo. Nomor 74/PDT.SUSPKPU/2024/PN.NIAGA.JKT/PST yang berlaku efektif sejak 25 Maret 2025. (wid,ist/dya)

Bahas BPJS Kesehatan dengan DPR RI MENKES: ENGGAK USAH 'COVER' YANG KAYA, FOKUS KE BAWAH SAJA

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan BPJS Kesehatan akan difokuskan pada masyarakat kurang mampu. Budi menyebutkan masyarakat kelas atas atau orang kaya tak perlu di-cover oleh BPJS. Dia juga ingin sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki. Budi mengatakan sistem rujukan harus lebih cepat agar pasien langsung tertangani.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja Kemenkes dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025). Budi mengatakan masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang sensitif.

"Dinamika dari kenaikan iuran ini maupun secara politis ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita," kata Budi dalam rapat di gedung DPR RI.

Budi mengatakan iuran BPJS Kesehatan yang murah sebenarnya menguntungkan masyarakat. Dia mengatakan saat ini BPJS Kesehatan berupaya agar iuran itu dikelola secara efisien.

"Tentu tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa iuran BPJS itu sebenarnya sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," ujarnya.

Budi mengatakan BPJS Kesehatan nantinya hanya digunakan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Dia mengatakan orang kaya mampu untuk memperoleh layanan kesehatan dari asuransi atau lembaga swasta.

"Nah sekarang bagaimana caranya supaya sustainability itu bisa dijaga. Kita juga ingin ada sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. Nah, di yang baru nanti rencana kita akan lakukan kelas rawat inap standar," kata Budi.

"Ini maksudnya apa? Supaya udah BPJS tuh fokusnya ke yang bawah aja, walaupun ini didebat terus sama BPJS. Tapi saya bilang, BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas satu itu, biar dia sama swasta," tambahnya.

Dia mengatakan Kemenkes telah menandatangani perjanjian dengan OJK terkait kombinasi swasta dan BPJS dalam asuransi. Dia mengatakan selama ini tak ada koordinasi terkait kewenangan kedua pihak tersebut.

"Itu sebabnya tadi pagi, kita tanda tangan sama OJK untuk combine benefit, udah di-improve juga oleh Komisi XI-OJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefit-nya," ujar Budi.

"Biarin yang besar swasta aja



ngambil. Supaya BPJS bisa sustain, diambil yang level bawah, semuanya di-cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di-cover kalau ada apa-apa, seperti itu," imbuhnya.

Menkes Budi juga ingin sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki. Budi mengatakan sistem

rujukan harus lebih cepat agar pasien langsung tertangani.

Budi awalnya mencontohkan seorang pasien BPJS Kesehatan terkena serangan jantung. Dia mengatakan sistem rujukan membuat pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe C dulu.

"Kita akan ubah rujukannya

berbasis kompetensi. Supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung, harus di bedah jantung terbuka, dia dari puskesmas, masuk dulu ke rumah sakit tipe C," kata Budi. (tin,dtc,ist/dya)

SYARAT UTAMA PENGHAPUSAN TUNGGAKAN

- **Terdaftar di DTSEN:** Tercatat resmi sebagai masyarakat miskin/tidak mampu.
- **Beralih ke PBI:** Peserta mandiri yang menjadi PBI, tunggakan dihapus otomatis.
- **Verifikasi Pemda:** Harus lolos verifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah.
- **Tunggakan ≤ 24 bulan:** Berlaku hanya untuk tunggakan maksimal 2 tahun.

DOKUMEN & LANGKAH PENDAFTARAN

- **Dokumen:** Siapkan KTP dan KK.
- **Daftar:** Isi formulir di kantor desa/kelurahan.
- **Verifikasi:** Data diproses oleh desa hingga dinas sosial.
- **Aktivasi:** BPJS aktif kembali sebagai peserta PBI setelah disetujui.



Dewas Soroti Penghapusan Tunggakan Bisa Timbulkan Moral Hazard

PEMERINTAH di bawah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Meski niatnya baik, rencana ini dinilai bisa menimbulkan moral hazard.

Catatan itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir. Moral hazard bisa timbul dari peserta baik yang patuh maupun tidak patuh sengaja menunggak iuran karena mengharapkan adanya penghapusan berikutnya.

"Ada beberapa catatan kami dari Dewan Pengawas untuk menjadi perhatian, bahwa dengan adanya pemutihan iuran ini ada potensi timbulnya moral hazard dari peserta yang sengaja menunggak iuran karena mengharapkan ada penghapusan berikutnya," kata Kadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

Kadir juga mengingatkan bahwa

penghapusan iuran BPJS Kesehatan harus betul-betul dilakukan secara tepat sasaran. Jangan sampai yang dilakukan pemutihan adalah orang yang sebenarnya tidak berhak.

Dengan adanya kebijakan ini, Kadir mengakui akan ada potensi kehilangan penerimaan BPJS Kesehatan dari peserta yang menunggak. "Kita harapkan ada semacam visi bersama atau persepsi bersama antar pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, DJSN terkait penghapusan tunggakan iuran ini," tambahnya.

Menurutnya, harus ada suatu manajemen risiko hukum dan akuntabilitas agar jangan sampai kebijakan ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.

"Karena adanya perbedaan persepsi tentang keuangan negara dan perlunya ketentuan

penghapusan yang diatur secara tegas dalam regulasi. Jangan sampai kita melakukan pemutihan iuran ini, nanti ujung-ujungnya jadi temuan BPK," imbuhnya.

Terkait kepastian implementasi penghapusan iuran BPJS Kesehatan, Kadir menyebut pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah. "Jadi kita masih menunggu bagaimana sih kebijakan yang dilakukan pemerintah dan berdasarkan itulah maka kita tentunya akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut," tambahnya. (tin,ist,kum/dya)

BELUM DIBAYAR BGN, 6 DAPUR MBG DI PANDEGLANG SETOP BEROPERASI

Karut marut program makan bergizi gratis (MBG) masih terus terjadi di beberapa daerah. Terbaru, enam dapur di Kabupaten Pandeglang berhenti beroperasi. Hal itu terjadi karena Badan Gizi Nasional (BGN) belum membayar biaya operasional. Sementara, 7 sekolah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, program MBG-nya dipastikan kembali tidak beroperasi. Bila sebelumnya program ini sempat terhenti karena masalah internal, kini kembali mandek karena kekosongan tenaga ahli gizi.

Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, Banten, berhenti sementara karena anggaran dari pemerintah pusat belum turun. Akibatnya, ribuan anak penerima manfaat tidak mendapatkan makanan bergizi dari program tersebut.

"Enam dapur dari lima kecamatan yang berhenti sementara karena memang menunggu proses pencairan dari BGN," kata Wakil Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan, Kamis (13/11/2025).

Doni menjelaskan berdasarkan aturan terbaru, dapur MBG tidak boleh menggunakan dana talangan untuk mengolah makanan. Sehingga, hal itu membuat dapur untuk sementara tidak beroperasi sebelum anggaran cair.

"Dalam aturan itu tidak boleh mempergunakan dana talangan, dulu bisa menggunakan dana talangan, tapi sekarang tidak boleh menurut pernyataan dari korwil SPPG kabupaten. Jadi kami berharap kepada BGN untuk segera mencairkan agar proses makan bergizi gratis bisa berjalan kembali," katanya.

Doni yang juga sebagai Asda I Pandeglang mengatakan saat ini tercatat ada 90 dapur yang tersebar di 35 kecamatan. Namun menurutnya, baru 50 dapur yang beroperasi, dan hanya 1 dapur yang sudah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Enam SPPG yang menghentikan operasionalnya antara lain, SPPG Labuan Banyubiru berhenti beroperasi sejak 7 November 2025, SPPG Kabayan 1 sejak 10 November 2025, SPPG Majasari Sukaratu 3 sejak 28 Oktober 2025.

Kemudian SPPG Sukaratu sejak 7 November 2025, SPPG Saketi Kadudampit sejak 3 November 2025 dan SPPG Menes sejak 12 November 2025. Penyebab Anggaran Belum Turun Rofiatul mengatakan, anggaran belum turun karena keterlambatan penyaluran.

Penyebabnya perubahan regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Regulasi yang dimaksud yakni keputusan Kepala Gizi Nasional RI No 244 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas petunjuk teknis bantuan pemerintah untuk program MBG tahun anggaran 2025.

Regulasi yang sedang diatur adalah penyetaraan penerima manfaat di setiap kecamatan dan insentif PIC sekolah. Selain itu, dalam regulasi baru ada perubahan aturan yang membatasi



POWER RANGERS BAGIKAN MBG-Petugas berkostum Power Rangers mengantarkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Tempurejo 1, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (13/11/2025). (ANTARA)

jumlah penerima manfaat per dapur menjadi maksimal 2.500 anak, dan 3.000 bagi dapur yang memiliki chef bersertifikat. "Sekarang sedang penyesuaian dengan aturan baru, jadi pencairan bertahap," ujarnya Koordinator Program MBG Kabupaten Pandeglang, Rofiatul Mufasiroh

Rofiatul menambahkan, anggaran saat ini sudah mulai turun dari BGN

pusat dan sedang dalam tahap pencairan mulai 12 November 2025. "Alhamdulillah sudah turun, tapi masih bertahap," kata dia

Sementara, program makan bergizi gratis (MBG) yang ditujukan untuk siswa di 7 sekolah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dipastikan kembali tidak beroperasi. Program yang sebelumnya sempat terhenti

karena masalah internal ini, kini mandek lagi karena kekosongan tenaga ahli gizi.

Penghentian program MBG di Malinau dikonfirmasi langsung oleh Kepala SPPG Batu Lidung, Anugrah Jalung. Ia membenarkan bahwa layanan makanan bergizi untuk para siswa terpaksa dihentikan untuk sementara waktu.

"Iya betul, terhenti mulai Rabu 12 November," ujar Anugrah Jalung, Kamis (13/10/2025).

Ia menegaskan, berhentinya program vital ini murni disebabkan ketiadaan tenaga profesional di bidang gizi. (tin,dtc,kcm/dya)

PENYERAPAN ANGGARAN MBG 2025 (11 NOV 2025)

Januari	Rp52,8 miliar
Februari	Rp1,18 triliun
Maret	Rp1,80 triliun
April	Rp2,54 triliun
Mei	Rp3,85 triliun
Juni	Rp6,02 triliun
Juli	Rp7,90 triliun
Agustus	Rp 13,20 triliun
September	Rp19,38 triliun
Oktober	Rp35,40 triliun
November	Rp43,47 triliun

Lansia dan Disabilitas: Rp 15.000/Porsi, Diberikan 2 Kali/Hari

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kelompok lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas akan menerima makan bergizi gratis dua porsi sehari dari Kementerian Sosial (Kemensos). Saifullah mengatakan program makan bergizi gratis ini berbeda dengan MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di bawah Badan Gizi Nasional.

"Ini makan bergizi gratis sehari dua kali. Pagi dan siang, tetapi diantarkan setiap pagi. Siapa yang melayani? adalah pokmas, kelompok masyarakat setempat," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

Gus Ipul mengatakan MBG lansia dan penyandang disabilitas akan memakai anggaran dari Kemensos. Sebab program ini merupakan transformasi dari program makanan gratis kepada lansia dan penyandang disabilitas yang telah dilakukan

Kemensos sebelumnya. "Per menu Rp 15.000. Per menu Rp 15.000 dua kali, berarti Rp 30.000," ujarnya.

Yang membedakan dari makan gratis Kemensos sebelumnya adalah peningkatan menu dan pamakaian nampian makanan atau food tray seperti MBG oleh Badan Gizi Nasional. Adapun program MBG ini akan diprioritaskan untuk penyandang difabel yang membutuhkan dan lansia berusia 75 tahun yang terlantar dan tinggal sendirian.

"Menu-menunya juga akan diperbarui sesuai dengan standar MBG. Ini MBG khusus lansia dan penyandang disabilitas," katanya. "Tentu ada juga menu-menu yang akan kita titipkan supaya lebih beragam. Nanti ada tambahan-tambahan lah. Pada saatnya nanti akan kami sampaikan. Kami masih menyusun terlebih dulu."

Gus Ipul mengatakan Kemensos mengatakan MBG ini akan menyasar 100 ribu lansia dan 30 ribu

penyandang disabilitas. Rencananya, program makan bergizi gratis ini akan dimulai tahun depan.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan dukungannya terhadap rencana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia dan penyandang disabilitas, selama dibarengi dengan pembenahan tata kelola.

Menurut Arzeti di Jakarta, Jumat, pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan pembenahan program yang saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk kasus keracunan dan makanan basi di berbagai daerah. (gus,ist,ant/dya)

Deteksi Dini Kesehatan Pranikah, Dinkes Kabupaten Blitar Sosialisasi SE Skrining Calon Pengantin

BLITAR - Sebagai upaya deteksi dini kesehatan pranikah (sebelum menikah), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar sosialisasi pemeriksaan kesehatan atau skrining untuk calon pengantin (catin).

Dinkes Kabupaten Blitar mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Bupati Blitar No.B/440.04.02.05.01/4983/409.11.2/2025 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin (Catin), dalam rangka bimbingan perkawinan dan peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga di Kabupaten Blitar, yang diterbitkan 13 Oktober 2025 lalu.

Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Kabupaten Blitar, Etti Suryani menyampaikan jika ini pertama kalinya, terbit SE tentang skrining catin di Kabupaten Blitar.

"Jadi setelah ada aturan diatasnya yaitu SKB dari Kemenkes, Kemnag dan BKKBN didetailkan lagi dalam SE Bupati Blitar ini tentang pelayanan catin ini," ujar Etti, Kamis (13/11/2025).

Lebih Etti menjelaskan, dari ketiga instansi tersebut telah komitmen bersama bahwa catin sebaiknya dilakukan skrining kesehatan, serta pembinaan dari instansi terkait lainnya.

"Maka untuk memperkuat legalitas atau payung hukum di daerah terkait skrining catin, maka dibuatlah SE Bupati Blitar ini. Karena setiap daerah berbeda kebijakannya, terkait skrining catin," jelasnya.

Diakui Etti salah satu yang mendorong diterbitkannya SE ini, kalau sebelumnya masih ada catin



Dinkes Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi SE Bupati Blitar tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin (Catin), dalam rangka bimbingan perkawinan dan peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga di Kabupaten Blitar, Kamis (13/11/2025).

yang tidak melakukan skrining kesehatan. Padahal ini penting, untuk mengetahui kondisi kesehatan catin.

"Dengan adanya skrining catin ini, bisa menjadi deteksi dini atau pencegahan penyakit dan penurunan kematian ibu dan bayi," ungkapnya.

Karena dari hasil skrining catin, bisa diketahui kondisi kesehatannya. Apakah bagus atau tidak untuk hamil, kalau kurang baik maka ditunda dulu (kehamilannya).

"Misalnya kondisi calon ibu yang anemia, kurang gizi atau ibu dengan penyakit tertentu," terang Etti.

Dengan adanya SE skrining kesehatan catin ini, maka setiap pasangan yang akan menikah wajib melakukan pemeriksaan kesehatannya.

Sehingga penyusunan SE melibatkan Kemenag dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB P3A) Kabupaten Blitar.

Dalam SE tersebut juga dijelaskan, skrining catin bisa dilakukan di Puskesmas, rumah sakit atau klinik yang ada di Kabupaten Blitar.

"Kalau selama ini hanya di Puskesmas, sekarang bisa dilakukan di

rumah sakit dan klinik dengan memberikan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang akan menjadi syarat ke KUA," tandasnya.

Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini mengundang seluruh Puskesmas, rumah sakit dan klinik di Kabupaten Blitar.

Adapun skrining catin yang dilakukan diantaranya, pemeriksaan fisik Antropometri dan tanda-tanda vital. Seperti tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan lingkaran lengan kiri atas. Serta pemeriksaan penunjang laboratorium jika diperlukan kedua belah pihak, yaitu Hb, golongan darah, gula darah, TB, Sivilis dan HIV.

"Sehingga bisa diketahui sebagai deteksi dini, kekurangan atau peyakitnya. Untuk dilakukan tindakan lanjut, agar tidak semakin berat atau parah," kata Etti.

Untuk biaya skrining catin, di Puskesmas sesuai Perda dan di rumah sakit maupun klinik sesuai dengan tarif masing-masing.

Sedangkan hasil dari skrining catin, paling banyak ditemukan Anemia dan gizi kurang. Tapi baru-baru ini, ditemukan penyakit menular

seperti Hepatitis dan HIV.

"Inilah salah satu fungsi skrining catin, mengetahui kondisi perempuan atau calon ibu untuk mencegah penularan pada anak dan melakukan tindakan lanjut pengobatannya," bebernya.

Intinya menurut Etti, dalam skrining catin ini setiap Puskesmas, rumah sakit dan klinik melakukan pemeriksaan kesehatan, mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan untuk syarat ke KUA dan mengisi aplikasi Kesehatan Catin atau KesCatin imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati menambahkan jika skrining catin tidak hanya fokus pada perempuan saja, tapi juga pria atau calon suaminya.

Dimana targetnya semakin banyak yang mendapatkan skrining kesehatan, sehingga semakin dini ditemukan penyakit yang mungkin ada tapi tidak diketahui.

"Untuk selanjutnya bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan, maupun pengobatan sehingga penyakit tidak semakin berat dan pembiayaan kesehatan menjadi lebih ringan," imbuhnya.

Selain itu, dengan skrining catin ini juga bisa mencegah serta menekan kasus kematian ibu dan anak atau ibu melahirkan.

Diketahui saat ini kasus kematian ibu di Kabupaten Blitar sudah menurun jauh, jika pada 2024 tercatat 13 kasus pada 2025 ini sampai Oktober hanya tercatat 2 kasus.

"Oleh karena itu, kami terus berupaya yang terbaik untuk menjaga kesehatan keluarga yang diawali dengan skrining catin ini," pungkasnya. (Ais/Dya)

Kasus Cesium-137 Cikande Disebut Bisa Dipidanakan

JAKARTA - Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyebut, terpaparnya radioaktif Cesium-137 atau Cs-137 di 24 pabrik di kawasan industri Cikande, Banten menjadi bentuk kelalaian perusahaan. Bahkan, hal ini bisa diseret ke ranah pidana.

Timboel mengatakan pengusaha industri diwajibkan menyediakan tempat kerja yang aman bagi para pekerjanya. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan di Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ya memang harus dipastikan pekerja itu bekerja di tempat yang aman. Kalau kawasan industri Cikande

yang terpapar radioaktif Cs-137, menurut saya itu kelalaian perusahaan, kelalaian kawasan industri untuk memastikan tempat kerja itu aman," katanya, Kamis (13/11/2025).

"Dan itu bisa menjadi sebuah kelalaian yang berdampak pada sanksi pidana yang berpotensi mengancam nyawa pekerja. Nah, oleh sebab itu, saya sih berharap harus ada pencegahan," tambahnya.

"Tempat kerja yang tidak aman yang menyebabkan kecelakaan penyakit karena kerja. Dan tentunya pemerintah harus turun untuk memastikan pencemaran atau paparan tentang radioaktif Cs-137 ini bisa diselesaikan. Untuk seluruh kawasan industri lainnya, menurut

saya harus ada pencegahan," jelasnya.

Pencegahannya, sebut Timboel, harus ada satuan tugas yang bisa memastikan proses pencegahan itu berjalan.

"Pemerintah harus turun tangan segera untuk memastikan kawasan industri Cikande ini tidak lagi memakan korban. Artinya semua sudah selesai dan sudah aman," tambahnya.

"Jadi memang K3 menjadi sebuah keniscayaan dalam regulasi ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan itu yang memang harus dilakukan supaya pekerja terlindungi di tempat kerja pada saat dia bekerja. Dan tidak boleh dia terpapar karena dia akan mengancam nyawa seperti itu," bebernya.

Ia juga menyoroti mengenai 11 pekerja pabrik di Cikande yang terpapar radioaktif, menurutnya, itu menjadi tanggung jawab pengusaha memastikan proses pengobatan pekerja. Selain pengobatan bagi 11 pekerja, perusahaan harus memastikan keluarga dan dampak ke depan dari paparan Cs-137 itu.

"Jadi 11 pekerja itu ketika lagi dirawat tetap dibayar upahnya tidak boleh di PHK. Kemudian juga bagaimana dengan keluarganya. Kita nggak tahu ini penyakit akibat terpaparnya radioaktif Cs-137, bagaimana dengan keluarga. Dan juga keluarga harus bisa diantisipasi supaya jangan sampai terpapar menjadi sakit dan sebagainya," pungkasnya. (wid, blo, ist/dya)

Kawasan Kos-kosan, Kecamatan Lowokwaru Jadi Wilayah Rawan Kebakaran Kota Malang



Ilustrasi: Pemadaman api oleh personel damkar Kota Malang.
(dok. UPT Damkar Malang Kota)

MALANG - Kawasan kos-kosan di Kecamatan Lowokwaru tercatat sebagai wilayah rawan kebakaran di Kota Malang. Untuk menekan potensi itu, Satpol PP Kota Malang kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Non-

Kebakaran.

"Setiap tahun kami menyusun peta kerawanan kebakaran dan gangguan ancaman kepada manusia. Biasanya kami rilis pada bulan Februari, termasuk wilayah mana saja yang memiliki tingkat risiko tinggi," ujar Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, Kamis (13/11/2025).

Dari hasil pemetaan terakhir, kata Heru, kawasan kos-kosan di Kecamatan Lowokwaru menjadi wilayah paling rawan kebakaran dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Malang. Penyebab utamanya adalah faktor kelistrikan yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Banyak kasus kebakaran di sana

disebabkan aliran listrik. Kalau yang disebabkan oleh tabung LPG justru kalah banyak dibanding korsleting listrik," jelasnya.

Menurut Heru, kemudahan masyarakat dalam memperoleh peralatan elektronik dengan harga murah kerap diikuti dengan ketidaksiapan instalasi listrik di tempat tinggal termasuk kos-kosan. Hal itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko kebakaran di kawasan padat hunian seperti kos-kosan.

"Sering kali masyarakat lupa kalau kabel-kabel yang ada di rumah atau kos itu tidak siap menanggung voltase tinggi," tambahnya.

Untuk menekan risiko tersebut, Satpol PP Kota Malang saat ini tengah menggodok Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran. Dalam aturan tersebut, nantinya akan diatur pula standarisasi penanggulangan kebakaran di gedung-gedung termasuk rumah kos.

Ditambahkannya, salah satu poin penting dalam Ranperda ini adalah

kewajiban bagi masyarakat untuk mengganti instalasi listrik apabila melakukan peningkatan daya.

"Kami kemarin sudah melaksanakan konsultasi publik terkait ranperda ini. Termasuk juga kami mengundang PLN. Harapannya nanti, ketika PLN menerima permintaan menaikkan daya dari 1.300 ke 2.200 misalnya, masyarakat wajib mengganti instalasinya agar aman," kata Heru.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR-PKP Kota Malang. Di mana dua orang inspektur dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP, akan dilibatkan dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan baru.

Lebih lanjut, Heru menambahkan, saat ini peta kerawanan yang digunakan masih berbasis wilayah kecamatan. Namun, mulai tahun depan, pihaknya menargetkan pemetaan tersebut akan diperluas hingga tingkat kelurahan. (Santi/Dya)

Akibat Cuaca Ekstrem, Target Produksi Tebu Kabupaten Malang 2025 Terancam Meleset

MALANG - Produksi hasil panen tebu di Kabupaten Malang pada tahun 2025 ini diperkirakan tidak akan mencapai target. Kondisi cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi faktor utama penghambat proses panen dan distribusi hasil tebu di sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Saniputera, menyebutkan hingga akhir September 2025, hasil panen tebu baru mencapai sekitar 2,7 juta ton. Angka tersebut jauh di bawah realisasi tahun 2024 yang menembus 4 juta ton.

"Petani saat ini masih berjuang dengan cuaca ekstrem agar tebu di lahan bisa terserap semua. Karena kondisi di lahan sekarang becek, kendaraan truk tidak bisa masuk. Kadang petani harus menggunakan motor untuk mengangkut hasil panen," ujar Avicenna, dikutip pada Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Malang sejak pertengahan

tahun membuat proses panen menjadi tidak maksimal. Infrastruktur jalan menuju lahan-lahan tebu banyak yang rusak dan berlumpur sehingga menyulitkan mobilisasi hasil panen dari lahan ke pabrik.

Kondisi tersebut turut berdampak pada kinerja produksi dan distribusi tebu di tingkat petani. Padahal, menurutnya, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dengan areal perkebunan tebu terluas di Jawa Timur.

Meski menghadapi kendala cuaca dan infrastruktur, Avicenna menyebut pihaknya tetap berupaya memaksimalkan serapan panen di sisa waktu tahun berjalan. Dirinya optimistis, dengan dukungan berbagai program pemerintah, hasil panen tebu di Kabupaten Malang masih bisa ditingkatkan meskipun tidak mencapai target optimal.

"Salah satu program yang diandalkan ialah program bongkar ratoon dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI. Program tersebut merupakan bagian dari upaya peremajaan tanaman tebu dengan mengganti tanaman lama yang telah

beberapa kali dipanen dengan varietas baru yang lebih unggul," katanya.

Avicenna mengungkapkan, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi bongkar ratoon seluas 15 ribu hektare dari pemerintah pusat. Namun, target tersebut belum bisa sepenuhnya terealisasi pada tahun 2025 karena masih banyak lahan yang belum selesai panen.

"Target kami pertengahan November bongkar ratoon selesai semua. Namun karena keterbatasan waktu, lahan yang kami usulkan baru 1.142 hektare," jelasnya.

Dari total lahan yang telah diusulkan, sebanyak 400 hektare di antaranya sudah siap untuk dilakukan penanaman. Namun, bibit tebu varietas unggul yang baru diterima baru mencakup lahan seluas 76 hektare.



Ilustrasi: Tanam Perdana Tebu Bongkar Ratoon di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kab Malang)

Ditambahkannya, masih ada kekurangan bibit untuk sekitar 324 hektare lahan lainnya. Ia pun berharap pihak penyedia bibit dapat segera memenuhi kebutuhan tersebut agar jadwal peremajaan tanaman dapat berjalan sesuai rencana.

"Karena sesuai perencanaan, seluruh proses bongkar ratoon ditargetkan selesai pada pertengahan November," pungkasnya. (Santi/Dya)

SHUTDOWN 43 HARI BERAKHIR, PEMERINTAH AS KEMBALI BEROPERASI

Setelah lebih dari enam pekan lumpuh akibat kebuntuan politik di Kongres, roda pemerintahan Amerika Serikat akhirnya kembali berputar. Presiden Donald Trump pada Rabu malam (12/11/2025) waktu setempat menandatangani Undang-Undang Anggaran Sementara yang secara resmi mengakhiri penutupan layanan pemerintahan federal (shutdown) terpanjang dalam sejarah negara itu yaitu selama 43 hari. Meski pemerintah kembali beroperasi, perdebatan utama seputar subsidi asuransi kesehatan belum menemukan titik akhir. Akankah ada shutdown jilid kedua?

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) baru saja resmi keluar dari masa penutupan pemerintahan atau government shutdown yang tercatat berlangsung selama 43 hari, atau yang terpanjang sepanjang sejarah Negeri Paman Sam.

Langkah ini menandai berakhirnya masa penuh ketidakpastian yang telah mengguncang ekonomi nasional, mengganggu layanan publik, serta menunda pembayaran bagi lebih dari 2,2 juta pegawai federal di seluruh negeri.

"Hari ini kami mengirimkan pesan jelas, Amerika tidak akan tunduk pada pemerasan politik," ujar Trump di Ruang Oval Gedung Putih, disambut tepuk tangan anggota parlemen Partai Republik yang hadir dalam penandatanganan dikutip Kamis (13/11/2025) WIB.

Krisis dimulai pada 1 Oktober 2025, ketika Kongres gagal menyepakati rancangan anggaran tahunan federal. Pertentangan tajam antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait subsidi asuransi kesehatan dalam skema Obamacare (Affordable Care Act) menjadi pemicu utama.

Partai Demokrat bersikukuh mempertahankan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, sementara sebagian Republik menganggap subsidi itu sebagai pemborosan yang membebani anggaran.

Ketegangan politik ini berimbas langsung pada penutupan 25% lembaga pemerintah federal.

Dampaknya terasa luas, bandara kekurangan staf pengamanan, taman nasional tutup, lembaga penelitian berhenti beroperasi, hingga ratusan ribu pegawai dirumahkan tanpa bayaran.

Menurut data Kantor Anggaran Kongres (CBO), shutdown tersebut menyebabkan kerugian ekonomi mencapai sekitar 16 miliar dollar AS (setara Rp 248 triliun) per pekan, dan memangkas pertumbuhan PDB kuartal IV hingga 0,3 poin persentase.

Selain itu, UU ini juga mengatur larangan bagi pemerintah untuk memulai proyek militer baru yang belum didanai secara resmi tahun sebelumnya, serta menaikkan anggaran keamanan bagi Mahkamah



Trump menunjukkan tanda tangan yang dibubuhkan dirinya pada RUU yang mengakhiri shutdown pemerintah AS (AFP)

Agung dan Kongres sebesar US\$88 juta untuk merespons meningkatnya kekerasan politik di AS.

Meski pemerintah kembali beroperasi, perdebatan utama seputar subsidi asuransi kesehatan belum menemukan titik akhir. Pemungutan suara lanjutan dijadwalkan

berlangsung Desember 2025, sementara jutaan warga masih menanti kepastian.

"Tanpa subsidi, premi asuransi bisa melonjak dua kali lipat dan dua juta warga berisiko kehilangan perlindungan," ungkap laporan CBO.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR,

Dampak bagi Indonesia: Nilai Tukar Rupiah hingga Modal Asing

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari masa government shutdown terpanjang dalam sejarah, yang berlangsung selama 43 hari. Kebijakan ini menjadi titik balik penting setelah lebih dari satu juta pegawai negeri tak menerima gaji, membuat layanan publik lumpuh, penerbangan terganggu karena kekurangan petugas, dan sejumlah data ekonomi tertunda.

Kini aktivitas pemerintahan berangsur normal, disambut positif oleh pelaku pasar global.

Pemulihan ini dianggap mengurangi ketidakpastian fiskal yang selama enam pekan terakhir menekan berbagai sektor layanan publik dan konsumsi masyarakat AS.

Berakhirnya shutdown tidak hanya membawa kelegaan bagi perekonomian global, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang terbesar dan tujuan utama investasi dari AS, normalisasi fiskal Negeri Paman Sam diperkirakan memengaruhi nilai tukar rupiah, ekspor, serta arus modal di pasar keuangan nasional.

Sejak penutupan pemerintahan AS dimulai pada 1 Oktober 2025, permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar meningkat tajam. Indeks Dolar (DXY) naik 1,98% sepanjang periode itu, menekan mata uang negara berkembang termasuk rupiah yang tercatat melemah 0,78%. Lonjakan dolar ini disebabkan oleh ketidakpastian fiskal yang membuat investor global mencari aset aman, sementara publikasi data ekonomi AS tertunda sehingga arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed) sulit diprediksi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa dinamika global masih akan terus memengaruhi nilai tukar rupiah. Namun BI, katanya, tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas.

"Dinamika global masih terus berlangsung, dan Bank Indonesia akan selalu hadir untuk menstabilkan nilai tukar dengan memanfaatkan seluruh instrumen yang tersedia," ujar Ramdan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/11/2025).

Hakeem Jeffries, menegaskan perjuangan belum selesai. "Kami tidak akan menyerah memperjuangkan akses kesehatan yang adil bagi semua warga," katanya.

Sementara itu, kubu Republik yang dipimpin Mike Johnson, bersikeras pembahasan subsidi tidak akan dimasukkan dalam agenda utama parlemen. Namun sejumlah senator moderat membuka peluang negosiasi, terutama untuk memperpanjang subsidi bagi warga miskin dengan pengawasan ketat.

Selain kesehatan, isu krusial lainnya adalah program bantuan pangan SNAP, yang sempat lumpuh total selama shutdown. Sekitar 42 juta warga berpenghasilan rendah tidak menerima dana bulanan senilai rata-rata US\$190 (Rp 3,18 juta) per orang. (blo,afp,ist/dya)

ISI UU YANG MENGAKHIRI SHUTDOWN

- Pendanaan sementara hingga 30 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres menyusun anggaran penuh untuk sisa tahun fiskal.
- Pemblokiran PHK massal pegawai federal hingga Januari 2026, melindungi sekitar 300.000 pekerja yang sempat dipecat selama shutdown.
- Pembayaran gaji tertunggak bagi seluruh pegawai dan kontraktor federal.
- Pemulihan program bantuan pangan (SNAP) dan peningkatan 8% anggaran untuk program Women, Infants, and Children (WIC).
- Pendanaan penuh untuk Departemen Pertanian, FDA, Departemen Urusan Veteran, dan proyek militer.



Ia menambahkan, pelemahan rupiah bersifat sementara dan berangsur menguat seiring langkah stabilisasi yang terus dilakukan BI di berbagai pasar. "Kami yakin pelemahan rupiah hanya sementara, dan akan kembali menguat melalui intervensi di pasar spot, NDF, DNDF, maupun pasar SBN," ujarnya.

Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Kamis siang (13/11/2025) melemah tipis ke Rp 16.739 per dolar AS, turun 22 poin atau 0,13 persen dari penutupan sebelumnya.

Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok. Karena itu, pemulihan ekonomi di AS akan langsung berdampak pada ekspor nasional. Berakhirnya shutdown membuat ketidakpastian fiskal dan gangguan logistik di AS mulai reda, membuka peluang naiknya permintaan impor dalam waktu dekat. (wid,ist/dya)

BENARKAH TIDUR DENGAN KIPAS ANGIN PICU ASAM URAT?

Media sosial kembali dihebohkan oleh video viral di TikTok yang mengaitkan kebiasaan tidur dengan kipas angin sebagai penyebab penyakit asam urat. Dalam unggahan tersebut, seorang remaja berusia 17 tahun dikisahkan sering mengeluh nyeri di kaki setiap bangun tidur. Benarkah?

Setelah diperiksa, ia ternyata mengidap asam urat atau gout. Pembuat video kemudian menyimpulkan bahwa penyakit itu muncul akibat kebiasaan sang remaja tidur dengan kipas angin yang diarahkan langsung ke tubuh sepanjang malam.

Video itu segera menyebar luas dan memicu perdebatan di berbagai platform media sosial. Banyak warganet membagikan pengalaman serupa, mengaku merasakan nyeri sendi setelah semalaman tidur dengan kipas angin menyala.

"Gw yg baru kena, padahal umur masih 18," tulis seorang pengguna TikTok. Yang lain menambahkan, "Kaki q ngilu klo kena kipas angin, tapi gak bisa tidur klo gak pakai kipas."

Namun, benarkah kipas angin bisa menyebabkan asam urat? Menurut para ahli medis, klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. Spesialis

penyakit dalam, dr Aru Ariadno, SpPD-KGEH, menegaskan bahwa tidak ada hubungan langsung antara paparan kipas angin dan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh.

"Tidur dengan kipas angin yang diarahkan langsung ke badan tidak menyebabkan asam urat ataupun penyakit lain. Itu murni mitos," ujar dr Aru.

Ia menjelaskan, penyebab utama asam urat justru berasal dari dua faktor genetik (herediter) dan gaya hidup yang tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, atau seafood, serta kebiasaan kurang minum air putih dan jarang berolahraga, menjadi pemicu utama peningkatan kadar asam urat.

Senada, dr Rudy Kurniawan, SpPD, menuturkan bahwa kipas angin bukanlah penyebab penyakit, melainkan faktor yang dapat memperburuk gejalanya pada individu yang sudah memiliki kadar asam urat tinggi. "Udara dingin dapat memicu kambuhnya nyeri sendi pada penderita asam urat karena suhu rendah membuat kristal urat lebih mudah mengendap di persendian," jelasnya.

Artinya, kipas angin memang bisa membuat rasa nyeri terasa lebih tajam pada penderita gout, tapi tidak menjadi biang keladi penyakit itu sendiri. "Kipas angin tidak meningkatkan kadar asam urat. Yang meningkatkan adalah pola makan, obesitas, dan gangguan metabolisme," tambah dr Rudy.

Mengapa Dingin Picu Nyeri?

Secara medis, rasa nyeri sendi akibat asam urat terjadi karena penumpukan kristal monosodium urat

di jaringan sendi. Ketika suhu tubuh turun — misalnya karena udara dingin dari kipas angin — kristal tersebut lebih mudah mengendap. Itulah mengapa penderita gout sering mengeluh nyeri di kaki atau jari saat cuaca dingin atau setelah tidur dengan kipas angin menyala semalaman.

Namun, hal itu hanya memicu gejala kambuh, bukan penyebab munculnya penyakit. "Kalau kadar asam urat dalam darah normal, tidur pakai kipas angin pun tidak akan menimbulkan nyeri," tegas dr Aru.

Menurut dr Aru dan dr Rudy, asam urat disebabkan oleh akumulasi purin, yaitu zat alami dari makanan dan hasil metabolisme tubuh.

Beberapa sumber purin tinggi antara lain jeroan seperti hati, ginjal, atau usus. Kemudian daging merah dan makanan laut (udang, kerang, sarden).

Minuman beralkohol, terutama bir dan minuman manis dengan fruktosa tinggi juga mengandung purin.

Tubuh normalnya akan membuang kelebihan purin melalui ginjal. Namun pada penderita gout, proses ini terganggu sehingga kadar asam urat meningkat dan mengkristal di persendian.

Selain makanan, faktor genetik turut memengaruhi. Jika salah satu orang tua memiliki riwayat asam urat, anaknya memiliki risiko lebih tinggi mengalaminya. Pola hidup modern juga memperburuk situasi terlalu banyak duduk, kurang olahraga, stres, dan kebiasaan makan malam berlebihan.

"Generasi muda kini banyak

yang terkena asam urat karena gaya hidup instan — junk food, minuman manis, dan kurang gerak. Ini yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kipas angin," ujar dr Rudy.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana informasi kesehatan yang keliru bisa cepat menyebar di dunia digital. Banyak masyarakat yang langsung mempercayai narasi tanpa memverifikasi sumber medis. "Masyarakat perlu lebih kritis dan selektif. Tidak semua yang viral itu benar," kata dr Aru.

Platform seperti TikTok dan Instagram memang memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga membuka celah bagi penyebaran hoaks kesehatan. Mitos seputar kipas angin hanyalah salah satu contoh dari banyak isu serupa yang kerap menyesatkan publik.

Para ahli mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber tepercaya, seperti dokter, rumah sakit, atau situs resmi lembaga kesehatan. "Jika ragu, konsultasikan langsung. Jangan jadikan media sosial sebagai pengganti dokter," pesan dr Rudy. (gus,rls,dtc/dya)

Tips Aman Tidur dengan Kipas Angin

1. Jangan arahkan kipas langsung ke tubuh. Biarkan udara berputar di ruangan, bukan ke wajah atau sendi.
2. Gunakan mode timer agar kipas mati otomatis setelah tubuh terasa sejuk.
3. Pastikan ventilasi udara baik, agar sirkulasi oksigen tetap lancar.
4. Gunakan pelembap udara (humidifier) jika udara terlalu kering.
5. Jaga kebersihan kipas untuk menghindari alergi debu.



PHISHING GENERASI BARU: KINI DEEPPFAKE DAN AI MENGINCAR BIOMETRIK

Ancaman phishing kini memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Jika dulu para penipu digital hanya memburu kata sandi atau data kartu kredit, kini mereka mengincar sesuatu yang jauh lebih pribadi, biometrik dan tanda tangan digital.

7 CARA MENGHINDARI WEB PHISING

1. PERIKSA URL DENGAN TELITI
2. GUNAKAN HTTPS
3. HATI-HATI DENGAN EMAIL ATAU PESAN YANG MENCURIGAKAN
4. VERIFIKASI MELALUI KONTAK RESMI
5. GUNAKAN SOFTWARE KEAMANAN
6. PERBARUI BROWSER SECARA BERKALA
7. GUNAKAN AUTENTIKASI DUA FAKTOR (2FA)

berbasis AI di media sosial dan aplikasi pesan bahkan bisa berpura-pura menjadi teman, rekan kerja, atau pasangan daring. Mereka membangun hubungan secara perlahan sebelum melancarkan penipuan investasi atau skema romantis palsu.

“Konvergensi AI dan taktik mengelak telah mengubah phishing menjadi tiruan komunikasi sah yang hampir alami, menantang bahkan bagi pengguna yang paling waspada sekalipun,” jelas Olga Altukhova, pakar keamanan dari Kaspersky.

Gelombang phishing terbaru kini beralih fokus dari kata sandi ke data yang tak dapat diubah, seperti wajah, sidik jari, dan tanda tangan elektronik. Para penyerang menggunakan situs palsu yang meminta izin kamera ponsel dengan alasan “verifikasi identitas” untuk mencuri data biometrik.

Begitu direkam, data tersebut bisa dipakai untuk membuka akses ke akun penting atau bahkan diperjualbelikan di dark web.

Hal serupa terjadi pada tanda tangan digital dan tulisan tangan. Kampanye phishing meniru platform sah seperti DocuSign atau layanan penandatanganan dokumen daring lainnya untuk menipu pengguna agar mengunggah tanda tangan mereka ke situs palsu. Akibatnya, kerugian finansial maupun reputasi bagi perusahaan bisa sangat besar.

“Penyerang tidak lagi puas dengan mencuri kata sandi,” lanjut Altukhova. “Mereka menargetkan data biometrik serta tanda tangan elektronik dan tulisan tangan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan.” Lebih canggih lagi, penjahat siber kini

menggabungkan CAPTCHA ke situs phishing. Taktik ini menipu sistem keamanan otomatis yang biasanya mendeteksi situs berbahaya, karena CAPTCHA sering dianggap sebagai tanda situs sah.

Platform tepercaya seperti Telegram dan bahkan Google Translate juga dimanfaatkan untuk menyamarkan tautan phishing. Misalnya, halaman Telegraph Telegram digunakan untuk menyimpan konten berbahaya yang tampak seperti artikel atau formulir resmi. Selain itu, sistem bertenaga AI mampu menganalisis data publik dari media sosial dan situs perusahaan untuk membuat serangan yang sangat spesifik—misalnya email dari “bagian HR”

menyebut nama karyawan atau jabatan yang benar. Dengan serangan yang semakin halus dan sulit dibedakan dari komunikasi sah, pengguna perlu mengubah pola pikir. Skeptisisme menjadi tameng baru dalam era deepfake. “Pengguna harus semakin skeptis dan proaktif agar tidak menjadi korban,” tegas Altukhova.

“Phishing berbasis AI kini menyerang pada tingkat yang sangat personal, memanfaatkan rasa percaya yang kita miliki terhadap teknologi dan manusia di balik layar.” Kaspersky menekankan bahwa perusahaan perlu memperbarui sistem keamanan digital mereka, sementara individu harus berhati-hati setiap kali diminta membagikan data wajah, suara, atau tandatangan secara daring (wid, ist/ dya)

Menurut laporan terbaru Kaspersky, lebih dari 142 juta upaya phishing berhasil diblokir hanya dalam kuartal kedua tahun 2025. Angka ini naik 3,3 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Lonjakan ini bukan sekadar statistik, melainkan tanda bahwa teknik penipuan daring telah berevolusi — dipersenjatai dengan kecerdasan buatan (AI) yang semakin sulit dibedakan dari manusia asli.

Kini, para pelaku kejahatan siber tak lagi mengandalkan email penuh salah ejaan. AI generatif dan deepfake memungkinkan mereka meniru komunikasi manusia secara sempurna—baik melalui teks, suara, maupun video.

Model bahasa besar (seperti yang digunakan pada chatbot dan asisten virtual) dimanfaatkan untuk menulis email atau pesan yang tampak profesional, lengkap dengan gaya bahasa dan tanda tangan khas perusahaan. Tak hanya itu, bot



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Menyusuri Sungai Maron Pacitan, Sepenggal Amazon di Jawa Timur

Di tengah rimbunnya hutan tropis di Kabupaten Pacitan, tersembunyi sebuah permata wisata alam yang disebut-sebut sebagai Amazonnya Jawa Timur (Jatim), bahkan Indonesia. Sungai Maron. Terletak di Dusun Maron, Desa Dersono, Kecamatan Pringuku, sungai ini menawarkan suasana menenangkan, eksotis, dan tak terlupakan.

Mengalir sejauh kurang lebih 4,5 kilometer dari hulu hingga ke muara di Pantai Ngirobojo, Sungai Maron menyuguhkan panorama alam yang menakjubkan. Aliran sungainya jernih berwarna kehijauan yang berpadu harmonis dengan pepohonan kelapa dan hutan bambu di sepanjang bantaran sungai. Perahu-perahu kecil meluncur perlahan di atas permukaan air yang tenang, membelah kabut pagi atau mentari sore yang memantul dari permukaan air bak cermin.

Burung-burung liar kadang tampak berterbangan di antara dahan, menciptakan suasana alami yang begitu damai dan jauh dari hiruk pikuk kota. Kabut tipis di pagi hari, suara gemericik air, serta aroma tanah dan dedaunan yang segar membuat pengalaman menyusuri Sungai Maron terasa magis.

Sepintas, pemandangan ini mirip dengan perjalanan menyusuri Amazon. Sungai terpanjang di dunia yang melintasi Brasil, Kolombia, dan Peru di Amerika Selatan. Menariknya, aliran air Sungai Maron di musim kemarau akan berwarna hijau sedikit kebiruan dan debitnya tidak terlalu tinggi. Semua akan berubah total menjadi cokelat, saat musim hujan datang.

"Memang banyak yang menyebut Sungai Maron mirip Amazon. Yang pasti bagi kami warga sekitar, dengan wisata sungai ini perekonomian bisa bergerak. Ada yang menyewakan kapal, bula waring, membuat camilan dan oleh-oleh," kata Ketua Pokdarwis Sungai Maron, Dedi Dwi Haryanto.

Sungai Maron telah dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah daerah, pusat hingga BUMN. Fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk menenangkan kenyamanan wisatawan. Tersedia perahu bermotor berkapasitas 4 orang dewasa, lengkap dengan pelampung dan pemandu lokal.

Menurut data Pokdarwis saat ini ada 132 kapal yang siap mengantarkan para wisatawan menyusuri Sungai Maron. "Pada awal wisata ini dibuka, hanya sekitar 7 kapal yang beroperasi. Namun seiring makin banyaknya jumlah pengunjung, masyarakat makin banyak yang bergabung. Naik ke 40 kapal kemudian sekarang 132 kapal," jelasnya.

Warung makan dan jajanan juga mudah ditemukan. Menyediakan hidangan lokal seperti nasi tiwul, ikan bakar dan es kelapa muda. Gazebo dan tempat istirahat juga ada di beberapa titik. Sepanjang area dermaga menyediakan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai.

Tersedia juga jembatan bambu, dermaga kecil, dan titik-titik instagenik untuk berfoto dengan latar sungai dan hutan tropis.

Selain itu, beberapa operator juga menawarkan paket menyusuri sungai hingga ke Pantai Ngirobojo dan menyaksikan langsung matahari terbenam dari muara.

Menikmati keindahan Sungai Maron tidak perlu merogoh kocek dalam. Tiket masuk area wisata Rp 5.000 untuk dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak. Sementara, parkir

motor Rp 3.000, mobil Rp 5.000 dan Rp 10.000 untuk bus/elf. Sementara untuk kapal Rp 100.000 muat untuk 4 orang," katanya.

Salah satu daya tarik unik Sungai Maron adalah kesempatan untuk melihat goa-goa kecil alami di pinggir sungai dan juga kegiatan memancing di area tertentu. Ikan kakap merah, bening, dan sidat ada di sana. Pengunjung juga bisa berenang di sungai ini. Tak hanya itu, jika sedang musimnya, wisatawan dapat menikmati jambu susu yang tumbuh liar disepanjang Sungai Maron.

Bagi yang ingin menikmati suasana lebih intens, beberapa warga juga menawarkan pengalaman camping di sekitar bantaran sungai.

Untuk mencapai lokasi Sungai Maron, jarak tempuhnya sekitar 40 km arah barat pusat kota Pacitan atau sekitar 1 jam 10 menit. Berkendara menyusuri Tumpak Rinjing hingga Dadapan Watukurung yang berkelok menanjak dan menurun dengan sejumlah kelokan tajam. "Ke depan kami akan terus mengembangkan wisata ini dan tentunya membutuhkan bantuan dari semua pihak. Mulai dari promosi maupun fasilitas," katanya.

Dwi menceritakan ada tanah kas desa yang dicita-citakan menjadi area istirahat bagi wisatawan yang menyusuri sungai. Di sana akan dilengkapi tempat makan, bersantai hingga area perkemahan. "Jadi di tengah perjalanan, wisatawan mampir di titik tersebut untuk istirahat sekaligus menikmati alam. Saat ini masih tersedia tanah saja, masih rencana. Semoga bisa segera kami

wujudkan," jelasnya.

Selain itu di area hulu, ada spot yang sangat bagus untuk river tubing. Survei dan pemantapan lokasi saat ini terus dilakukan. Sensasi menghanyut dengan sarana ban di sungai dikatakannya akan menantang dan berbeda dengan destinasi lain yang sudah ada.

"Kami membutuhkan pelatihan dan pendampingan. Sebab salah satu tantangan kami dalam mengembangkan Subgair Maron adalah terkait SDM. Dengan ilmu dan skill yang cukup, kami optimistis bisa lebih cepat berbenah," tutupnya. (Dya)



Resmi! MK Larang ...dari hal 1

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan nomor Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Gugatan tersebut terkait dengan penugasan anggota Polri di luar kepolisian.

Gugatan itu diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Syamsul Jahidin merupakan mahasiswa doktoral sekaligus advokat. Sedangkan Christian Adrianus Sihite adalah lulusan sarjana ilmu hukum yang mengaku belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

Para Pemohon mengujikan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Para pemohon mempersoalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan pasal tersebut. Mereka menilai frasa tersebut membuat para polisi bisa menduduki jabatan di luar Polri tanpa mengundurkan diri atau pensiun.

Beberapa posisi yang dicontohkan pemohon yakni Ketua KPK (Setyo Budiyo), Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rudy Heriyanto Adi Nugroho), Kepala BNN (Suyudi Ario Seto), Wakil Kepala BSSN (Albertus Rachmad Wibowo), hingga Kepala BNPT (Eddy Hartono).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Kamis (13/11/2025).

"Menyatakan frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan satu per satu gugatan pemohon. Pertama terkait dengan Pasal 28 ayat (3) dalam UU Polri. MK terlebih dahulu menyinggung soal ketentuan Pasal 10 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. MK membandingkannya dengan Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

Berikut bunyi TAP MPR Pasal 10 ayat (3): "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

Sementara Pasal 28 ayat (3) UU Polri: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

"Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan suatu hal penting, yaitu Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," demikian kata Ridwan.

"Artinya apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian," sambungnya.

"Tidak ada keraguan rumusan demikian adalah rumusan norma yang *expressis verbis* yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain," lanjutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ridwan menegaskan bahwa jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dengan merujuk UU No 20 tahun 2023 tentang ASN.

"Jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial," ucapnya.

Lantas apa yang diubah oleh MK?

MK mengubah penjelasan pasal 28 ayat (3) UU Polri itu. MK menyatakan, ada frasa yang justru membuat rancu pasal 28 ayat (3) itu.

Ridwan membagi dua kalimat dalam menjelaskan frasa dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) UU Polri, yang sepenuhnya berbunyi: Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pertama, yakni kalimat "Yang dimaksud dengan 'jabatan di luar kepolisian' adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian."

Kalimat di atas, menurut MK, telah memenuhi substansi penjelasan suatu norma hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 176 dan angka 177 lampiran II UU 12/2011.

"Dalam hal ini, sepanjang frasa 'yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian' dimaksudkan untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh, in casu menjelaskan 'jabatan di luar kepolisian' sehingga tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma dalam pasal 28 ayat (3) UU 2/2002," kata Ridwan.

Sementara, kalimat yang menurut Ridwan membuat rancu adalah "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri."

Menurutnya, kalimat itu sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat (3) uu 2/2002 yang

mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud."Terlebih dengan adanya frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' telah mengaburkan substansi frasa 'setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian' dalam pasal 28 ayat (3) UU 2/2002," ucapnya.

"Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian," sambungnya.

Sehingga menurut MK, "Dalil pemohon bahwa frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) 2/2002 telah nyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum."

Dalam putusan itu, salah satu hakim konstitusi Arsul Sani menyatakan alasan berbeda. Dalam pokoknya, dia menilai frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar Kepolisian tanpa ada batasan yang jelas. (gus,ist,ant,kum/dya)

Tolak Setarakan Jabatan Kapolri Setingkat Menteri

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan yang meminta agar menyetarakan jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menjadi setingkat menteri.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan nomor 19/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di MK, Kamis (13/11).

Permohonan uji materi ini dimohonkan oleh tiga mahasiswa, yakni Syukur Destieli Gulo, Christian Adrianus Sihite, dan Devita Analisandra. Mereka mempersoalkan Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Polri.

Pasal 11 ayat (2) UU Polri berbunyi: "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya."

Sementara Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Polri menyebutkan: "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan

Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya."

Para Pemohon mengatakan frasa 'disertai dengan alasannya' dalam pasal tersebut tidak diatur secara jelas dalam UU Polri. Menurut mereka, pasal tersebut juga telah menimbulkan masalah saat ini.

Mereka mendalilkan, dalam situasi saat ini, Kapolri yang saat ini dijabat Listyo Sigit Prabowo tidak sah karena belum diangkat kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada hal, Kapolri mesti melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab kepada presiden. Ditambah, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan

hak prerogatif presiden.

Karenanya, para pemohon menilai, berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkat Kapolri, maka harus diikuti berakhirnya masa jabatan Kapolri. Dengan kata lain, para pemohon meminta jabatan Kapolri disetarakan dengan menteri dalam kabinet presiden.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat, pergeseran Kapolri menjadi setara dengan tidak sejalan dengan tujuan keberadaan Polri yang tertuang dalam UUD 1945. MK mengatakan, Kapolri adalah jabatan karier profesional yang tidak memiliki batas masa jabatan. Meski begitu, Kapolri tetap bisa diberhentikan oleh presiden berdasarkan evaluasi.

Tak dicantulkannya frasa setingkat menteri dalam UU Polri sudah tepat berdasarkan sistem ketatanegaraan. "Artinya, dengan memosisikan jabatan Kapolri menjadi setingkat menteri, Kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara," kata hakim konstitusi, Arsul Sani. Karenanya, Arsul mengatakan, permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. (ist,wid,rls/dya)



TIAP RW DAPAT RP5 JUTA, DPRD SURABAYA MINTA PROGRAM GEN Z TEPAT SASARAN

Arif Fathoni: Pembinaan Pemuda Harus Sesuai Karakter Wilayah, Bukan Proyek Seragam

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan anggaran sekitar Rp47 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk kalangan muda. Langkah ini untuk mendukung pengembangan kreativitas dan aktivitas para Gen Z di seluruh wilayah Kota Pahlawan. Nantinya, anggaran khusus tersebut akan diberikan sebesar Rp5 juta per RW setiap bulannya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengingatkan agar dana itu digunakan secara tepat sasaran dan tidak hanya untuk kegiatan seremonial semata.

"Anggaran ini harus benar-benar digunakan untuk pembinaan generasi muda. Karena kalau kita bicara generasi muda, itu berarti kita bicara masa depan Surabaya," kata Fathoni ketika ditemui Lentera di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (13/11/2025).

Politisi dari Golkar ini menjelaskan, dengan adanya anggaran khusus tersebut, pemerintah kota diharapkan dapat memunculkan pemuda-pemudi kreatif di setiap wilayah yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Surabaya. Ia menekankan pentingnya diferensiasi program pembinaan antarwilayah, sesuai karakteristik masing-masing kecamatan.

"Tiap wilayah punya karakter yang berbeda. Misalnya di kawasan Ampel, nilai religiusitasnya tinggi, maka pembinaan bisa diarahkan pada pengembangan wirausaha berbasis wisata religi. Sementara di wilayah lain seperti Gayungan atau Rungkut tentu beda lagi," jelasnya.

Menurutnya, anggaran pembinaan Gen Z yang dimasukkan di tiap kecamatan itu akan efektif jika camat mampu mengidentifikasi kebutuhan pemuda secara spesifik. Ia juga menegaskan agar wadah pelaksana kegiatan, seperti Karang Taruna, tetap netral dan bebas dari kepentingan politik.

"Saya berharap Karang Taruna menjadi jembatan untuk mengakomodasi kebutuhan pemuda,



(Ilustrasi) Para pemuda Surabaya mengikuti pameran di Balai Pemuda yang merupakan laboratorium kreativitas bagi Arek Suroboyo. (Dok.HumasSBY)

tapi harus bebas dari kepentingan politik," ucap Fathoni.

Terkait mekanisme, Fathoni menyebut pengajuan kegiatan dilakukan melalui proposal ke kelurahan dan diverifikasi di tingkat kecamatan. Nantinya, DPRD Surabaya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program agar tidak sekadar formalitas.

"Kalau nanti kegiatan di semua RW sama semua, ya kami akan minta anggaran ini dievaluasi di APBD Perubahan. Karena kalau hanya seremonial, eman (sayang) lah," sebutnya.

Fathoni mencontohkan berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk kawasan tengah kota, misalnya, pelatihan digital marketing dapat menjadi solusi bagi pemuda agar mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan ekonomilokal.

Sementara di wilayah timur Surabaya yang banyak memiliki tambak, kegiatan bisa difokuskan pada pelatihan pemasaran hasil perikanan berbasis teknologi informasi. Adapun di kawasan rawan konflik remaja, program bisa diarahkan pada peningkatan literasi digital untuk mencegah hoaks dan tawuran.

"Tujuan akhirnya adalah meningkatkan skill generasi muda agar mereka menjadi kader pelopor kemajuan Kota Surabaya," tutupnya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran Rp5

juta per RW per bulan mulai tahun 2026 untuk mendukung kreativitas dan kegiatan positif anak muda.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari usulan anak muda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiap wilayah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program yang diinisiasi generasi muda atau Gen Z sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.

"Anak-anak muda ini, Gen Z ini, dia tidak bisa dibuatkan permainan masa lalu seperti engklek. Maka di hari ini apa keinginannya, ketika ada keinginan itu, anak-anak muda bisa mengajukan kepada lurah dan camat. Maka akan dievaluasi kegiatan apa," kata Eri.

Eri menuturkan, kegiatan yang diajukan harus memberi dampak positif bagi masyarakat di wilayah RW setempat. Untuk itu, proses penilaian dilakukan secara terbuka oleh lurah, camat, serta pengurus RT/RW.

Untuk jenis program kegiatan yang diusulkan boleh beragam selama bermanfaat bagi anak-anak muda dan lingkungan di RW tersebut.

"Setelah disampaikan proposalnya, Lurah, Camat, RT/RW kumpul, sudah benar iki, dampaknya apa program dibuat RW kita. Kalau dampaknya ada, jalan," tuturnya.

Secara teknis, Eri mengungkapkan, anak-anak muda nantinya mengajukan proposal program kegiatan melalui RT/RW. Selanjutnya, proposal

program akan dibahas oleh RT/RW bersama lurah dan camat sebelum akhirnya disetujui.

"Jadi setiap bulan (mengajukan) di RT-RW, nanti disampaikan ke Lurah, Camat. RT/RW kumpul sama Lurah dan Camat, (misal) dampaknya (proposal) seperti ini, seperti ini, oke lepas (setujui)," ungkapnya.

Dengan adanya program khusus ini untuk Gen Z ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kreativitas anak muda sejak dari lingkungan terkecil.

"Surabaya ini dibangun oleh kekuatan anak muda, maka dimulailah dari RW-RW itu. Yang tua-tua juga jangan minta menang terus, kita juga harus menyiapkan anak-anak muda. Maka anak-anak muda inilah yang kita fasilitasi," tutupnya. (Ama,adv/Dya)



Anggaran ini harus benar-benar digunakan untuk pembinaan generasi muda. Karena kalau kita bicara generasi muda, itu berarti kita bicara masa depan Surabaya,"

ARIF FATHONI

Wakil Ketua DPRD
Kota Surabaya